**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA SOLOK”**

***ANALYSIS FINANCIAL PERFORMANCE OFFICE OF AGRICULTURE, FISHERY AND FORESTRY SOLOK CITY***

**Lara Monika, Andre Bustari**

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Ekasakti

Jln. Veteran Dalam No. 26 B, Padang (25113), Indonesia

E-mail : *laramonika734@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Tahun Anggaran 2009-2015. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam proses perumusan strategis suatu organisasi. Dan Penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau proses. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis varians, analisis pertumbuhan dan analisis rasio keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa; Kinerja keuangan yang diwakili oleh Analisis Varians untuk Pendapatan dan Belanja menunjukan hasil bahwa kinerja pendapatan belum baik sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik. Kemudian Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis pertumbuhan Aset, Ekuitas, dan Pendapatan, masing-masing akun mengalami peningkatan yang cukup baik diiringi dengan realisasi belanja yang juga meningkat dengan pertumbuhan kewajiban/hutang 0 (nol) %. Dan Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukan hasil bahwa derajat desentralisasi pada SKPD ini perlu perhatian khusus, karena angka derajat desentralisasi yang sangat rendah sehingga kemampuan daerah terhadap penyelenggaraan daerah otonom yang sangat bergantung kepada dana atau transfer pusat, otomatis rasio kemandirian daerahnya juga rendah dengan rasio ketergantuang daerah yang tinggi. Selain itu dalam hal efektifitas dan efisiensi pendapatannya menunjukan kurang efektif dan tidak efisien.

Keywords: Performance, Budget, Income, Expenditure and Funding

***ABSTRACT***

*This study attemps to evaluate performance financial office of agriculture, fishery and forestry solok city fiscal year 2009-2015. Performance was an image of on the level of achievment of the implementation of the an activity or program or wisdom in realizing target, the purpose, the mission and vission of organization set out in the process of the formulation of strategic an organization. And asses performance involves the records and measuring the achievment of activities in the direction of the mission through result displaye in the form of products, services or process of. Data analysis to research this using analysis variance, analysis growth and analysis the ratio financial.*

*The analysis show that; financial performance represented by analysis variance for income and expenditure showed the result that performance income not good while for the performance of expenditure good enough. Then Financial performance seen from analysis growth of, equity and revenue, each account has increased good enough accompanied by the realization shopping also rose to the growth of obligation/debt 0 ( zero ) %. And financial performance seen from the ratio financial analysis showed the result that degrees decentralization in working units this needs special attention, as the rate of degrees decentralization very low that the ability regions of the implementation of autonomous region that relies heavily to funds or transfer central, automatic the ratio independence the region is also low at a ratio of regional ketergantuang high. In addition in terms of effectiveness and efficiency pad his show less effective and inefficient.*

***Keywords: Performance, Budget, Income, Expenditure and Funding***

**PENDAHULUAN**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

 Dinas Pertanian merupakan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan untuk meningkatkan kualitas pertanian. Sekaligus sebagai fasilitator pembangunan pertanian di Indonesia. Maka dari itu Pemerintah melalui SKPD terkait bertanggungjawab kepada publik atas tindakan atau keputusan yang diambil. Para pemegang jabatan (pejabat publik) harus terbuka dan transparan kepada publik mengenai setiap keputusan yang diambil baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Wujud dari pertanggungjawaban permerintah yang bersifat finansial yaitu berbentuk laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan sebagai evaluasi kinerja. Sehingga dari Laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai kinerja keuangan. Untuk dapat melihat kondisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan atau sebuah organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dan sebagai pertanggungjawaban publik Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (SAP).

Dalam buku yang ditulis oleh Mahmudi, 2011 menjelaskan untuk pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang digunakan yaitu analisis varians, analisis pertumbuhan dan analisis rasio keuangan.

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada Dinas Pertanian merupakan Dinas yang mempunyai anggaran cukup besar setelah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Tahun 2015 anggaran untuk DAK tambahan bidang Pertanian dialokasikan sebesar Rp. 4 Triliun berdasarkan informasi dari Bapak Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc/Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI. Dengan demikian perhatian pemerintah dibidang pertanian cukup besar. Akan tetapi fenomena yang terjadi yaitu terdapat ketidakseimbangan antara pelayanan atau manfaat yang diterima oleh petani dibandingkan dengan alokasi anggaran yang disediakan. Masih banyak petani yang ekonominya masih belum terangkat, sehingga tujuan dari Dinas Pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani belum optimal. Ini terlihat angka kemiskinan setiap tahunnya meningkat.

 Dan dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut buku yang ditulis oleh Mahmudi, 2011 menjelaskan bahwa untuk memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Selain itu laporan keuangan pemerintah seharusnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Namun kenyataannya laporan keuangan pemerintah baru sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan belum digunakan secara optimal. Laporan keuangan pemerintah belum dilakukan analisis laporan keuangan secara memadai untuk pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan masih lebih didominasi oleh pertimbangan politik. Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi dan memutuskan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang, demi terwujudnya sasaran kinerja yang telah direncanakan. Dengan adanya penilaian kinerja keuangan hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang diperlukan di lapangan atau keadaan yang sesungguhnya.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang analisis kinerja keuangan sektor publik yang dituangkan dalam sebuah kripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok”.**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam proses perumusan penskemaan strategis suatu organisasi (Indra Bastian, 2014: 359). Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau proses yang dikemukakan oleh Larry D. Stout (Bastian dalam Joko Promono, 2014). Menurut James B. Whitakker (Indra Bastian, 2014:359) mendefinisikan penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Artinya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masayarakat luas.

Pada dasarnya penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo dalam Joko Promono, 2014) yaitu :

1. Untuk membantu merperbaiki kinerja pemerintah
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Menurut Wasidi dan Bambang (Irham Fahmi,2013:106) “Analisis rasio kuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan”.

Adapun manfaat analisis rasio keuangan (Irham Fahmi,2013:108) yaitu ;

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

Oleh karena itu, agar laporan keuangan lebih bermakna dan bermanfaat untuk pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja maka laporan keuangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Adapun metoda atau teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan dalam literatur yang ditulis oleh Mahmudi (2011:162) yaitu :

1. Analisis Selisih (Varians), dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dengan mengukur tingkat selisih antara realisasi dengan anggaran.
2. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan asset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, dan sebagainya.
3. Analisis Rasio-Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan pembanding antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun (Mahmudi,2011:163) yang terdiri dari;

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi,2011:170).

Dengan skala interval derajat desentralisasi dibawah ini sebagai berikut;

Sangat Kurang : 0,00 – 10,00%

Kurang : 10,01 – 20,00%

Sedang : 20,01 – 30,00%

Cukup : 30,01 – 40,00%

Baik : 40,01 – 50,01%

Sangat Baik : > 50,00%

(tim KKPFE UGM dalam Hanafi, dkk, 2009)

1. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2011:170). Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Sangat Rendah : 0,00 – 10,00%

Rendah : 10,01 – 20,00%

Sedang : 20,01 – 30,00%

Cukup : 30,01 – 40,00%

Tinggi : 40,01 – 50,00%

Sangat Tinggi : > 50,01%

(Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, dalam Masita Kaya,2014)

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2011:170).

 Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut;

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah;

Rendah Sekali: 0,00% - 25,00% = Instruktif

Rendah : 25,01% - 50,00% = Konsultatif

Sedang : 50,01% – 75,00% = Partisipatif

Tinggi : 75,01% - 100% = Delegatif

(Abdul Halim dalam Hony Adhiantoko, 2013)

1. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan (Mahmudi, 2011:170) sebagai berikut:
* Sangat efektif : > 100%
* Efektif : 100%
* Cukup efektif : 90%-99%
* Kurang efektif : 75%-89%
* Tidak efektif : < 75%
1. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Nilai efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

* Sangat efisien : < 5%
* Efisien : 5%-10%
* Cukup efisien : 11%-20%
* Kurang efisien : 21%-30%
* Tidak efisien : > 30%

(Mahmudi, 2011:171)

**Kerangka Konseptual**

Analisis Kinerja Keuangan:

* Analisis Varians
* Analisis Pertumbuhan
* Analisis Rasio Keuangan

Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok

TA. 2009-2015

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kota Solok.

 Metode Pengumpulan Data dilakukan Riset Kepustakaan *(library research)* dan Penelitian Lapangan *(field research)*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis varians, analisis pertumbuhan dan analisis rasio keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi PAD. Untuk menilai kinerja keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Varians**

Tabel. 1 : Analisis Varians Pendapatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **Varians/Selisih****Pendapatan** |
| 2009 | 85.458.000 | 65.630.000 | (19.828.000) |
| 2010 | 96.550.000 | 30.286.000 | (66.264.000) |
| 2011 | 93.375.000 | 78.356.500 | (15.018.500) |
| 2012 | 120.735.000 | 120.809.500 | 74.500 |
| 2013 | 204.680.000 | 178.136.000 | (26.544.000) |
| 2014 | 250.067.200 | 184.125.000 | (65.942.200) |
| 2015 | 237.700.000 | 195.666.000 | (42.034.000) |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

 Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat realisasi pendapatan dari tahun 2009-2011 belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Namun untuk tahun 2012 realisasi pendapatan sudah melewati target dengan selisih Rp. 74.500. Sedangkan untuk tahun 2013-2015 realisasi pendapatan belum terealisasi sesuai dengan target yang dianggarkan. Dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi, 2011 menyatakan bahwa kinerja pendapatan dikatakan baik apabila realisasi pendapatan melebihi dari yang dianggarkan. Dari hasil analisis varians pendapatan terlihat kinerja keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari selisih realisasi dengan anggaran dari tahun 2009-2015 tidak terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

Tabel 2 : Analisis Varians Belanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Anggaran** | **Realisasi** | **Varians/ Selisih Belanja**  |
| 2009 | 12.564.103.969 | 8.820.735.487 | 3,743,368,482 |
| 2010 | 9.657.141.242 | 8.384.346.885 | 1,272,794,357 |
| 2011 | 9.459.902.228 | 8.231.626.305 | 1,228,275,923 |
| 2012 | 10.824.416.698 | 9.273.770.166 | 1,550,646,532 |
| 2013 | 12.952.387.508 | 11.409.520.859 | 1,542,866,649 |
| 2014 | 16.961.671.280 | 14.575.230.332 | 2,386,440,948 |
| 2015 | 23.872.491.715,55 | 19.214.701.366 | 4,657,790,350 |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

 Dilihat dari hasil analisis varians belanja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Tahun Anggaran 2009-2015 kinerja belanja baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Hal ini terlihat dari selisih realisasi dengan anggaran belanja dari tahun 2009-2015 tidak melebihi anggaran yang dialokasikan.

**Analisis Pertumbuhan**

1. Analisis Pertumbuhan Aset

Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Pertumbuhan Aset pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aset Tahun Berjalan****(Xt)** | **Aset Tahun Sebelumnya (Xt-1)** | **Pertumbuhan****( (Xt – Xt-1)/ (Xt-1) X100%** |
| 17.743.729.442 | 14.042.659.097 | 26.36 |
| 19.913.857.274 | 17.743.729.442 | 12.23 |
| 22.045.155.319 | 19.913.857.274 | 10.70 |
| 26.335.337.003 | 22.045.155.319 | 19.46 |
| 30.495.769.419 | 26.335.337.003 | 15.80 |
| 31,441,856,941 | 30.495.769.419 | 3,10 |
| 36.085.840.381 | 31,441,856,941 | 14,77 |
| **Rata-rata pertahun** |  | **14,63** |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat pertumbuhan aset dari tahun ke tahun berfluktuasi. Adapun nilai pertumbuhan aset tertinggi ditahun 2009 sebesar 26,36%, dan nilai pertumbuhan aset terendah di tahun 2014 yaitu sebesar 3,10% ini disebabkan karena pembelian aset di tahun 2014 hanya 39,8% dari total anggaran yang disediakan. Untuk rata-rata pertumbuhan aset pertahun sebesar 14,63%. Terlihat pertumbuhan aset dari tahun ke tahun cenderung meningkat, secara keseluruhan pada periode ini kinerja SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok telah baik dikarenakan pertumbuhan yang positif.

1. Analisis Pertumbuhan Kewajiban

Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Pertumbuhan Kewajiban pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Kewajiban Tahun Berjalan (Xt)** | **Kewajiban Tahun Sebelumnya (Xt-1)** | **Pertumbuhan****( (Xt – Xt-1)/ Xt-1) X100%** |
| 2009 | **0** | **0** | **0** |
| 2010 | **0** | **0** | **0** |
| 2011 | **0** | **0** | **0** |
| 2012 | **0** | **0** | **0** |
| 2013 | **0** | **0** | **0** |
| 2014 | **0** | **0** | **0** |
| 2015 | 19.283.390  | **0** | **0** |
| **Rata-rata pertahun** | **0** |

Sumber : Laporan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat pertumbuhan kewajiban pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 adalah 0 (nol) %. Nilai kewajiban untuk tahun 2009-2014 sama dengan nol, ini dikarenakan sistem pencatatan akuntansi keuangan di Sektor publik berbasis kas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dan untuk tahun 2015 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pengganti PP No. 54 Tahun 2005. Dimana pada pencatatan akuntansi keuangan pada sektor publik diharuskan berbasis akrual sehingga terlihat nilai kewajiban sebesar Rp. 19.283.390,-.

1. Analisis Pertumbuhan Ekuitas Dana

Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Pertumbuhan Ekuitas Dana pada DPPDK Kota SolokTA. 2009-2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekuitas Dana Tahun Berjalan(Xt)** | **Ekuitas Dana Tahun Sebelumnya (Xt-1)** | **Pertumbuhan****( (Xt – Xt-1)/ Xt-1) X100%** |
| 17.743.729.442 | 14.042.659.097 | 26.36 |
| 19.913.857.274 | 17.743.729.442 | 12.23 |
| 22.045.155.319 | 19.913.857.274 | 10.70 |
| 26.335.337.003 | 22.045.155.319 | 19.46 |
| 30.495.769.419 | 26.335.337.003 | 15.80 |
| 31.441.856.941 | 30.495.769.419 | 3,10 |
| 36.066.556.991 | 31.441.856.941 | 14,70 |
| **Rata-rata pertahun** | **14,62** |  |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat pertumbuhan ekuitas dana dari tahun 2009-2015 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan nilai ekuitas dana tertinggi di tahun 2009 sebesar 26,36%, dan nilai pertumbuhan ekuitas dana terendah di tahun 2014 sebesar 3,10%. Ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai aset yang rendah, karena nilai ekuitas dana merupakan selisih nilai asset dengan kewajiban, sehingga jika pertumbuhan nilai asset rendah akan berdampak terhadap pertumbuhan nilai ekuitas dana. Tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan nilai ekuitas dana dibandingkan tahun 2014 sebesar 14,70%. Untuk rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas dana pertahun sebesar 14,62%. Karena Pertumbuhan ekuitas dana yang selalu positif, sehingga kinerja keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 pada periode ini telah baik.

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Adapun hasil dari perhitungan pertumbuhan PAD pada tahun 2009-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Pertumbuhan Pendapatan pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan Tahun Berjalan****(Xt)** | **Pendapatan Tahun Sebelumnya (Xt-1)** | **Pertumbuhan****( (Xt – Xt-1)/ Xt-1) X100%** |
| 65.630.000 | 64.905.000 | 1,12 |
| 30.286.000 | 65.630.000 | (53,85) |
| 78.356.500 | 30.286.000 | 158,72 |
| 120.809.500 | 78.356.500 | 54,18 |
| 178.136.000 | 120.809.500 | 47,45 |
| 184.125.000 | 178.136.000 | 3,36 |
| 195.666.000 | 184.125.000  | 6,27 |
| **Rata-rata pertahun** | **30,14** |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Dari tabel 6 di atas terlihat pada tahun 2009 pertumbuhan Pendapatan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 1,12%. Dan di tahun 2010 terjadi penurunan Pendapatan yang cukup tinggi yaitu melebihi 50% penurunannya dibandingkan tahun 2009 sebesar 53, 85%. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2010, namun pada tahun 2011 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berhasil meningkatkan Pendapatan nya sebesar 158,72% dibandingkan tahun 2010. Kemudian di tahun 2012 pertumbuhan Pendapatan meningkat sebesar 54,18%. Pada tahun 2013 penigkatan Pendapatan sebesar 47,45%. Untuk tahun 2014 dan 2015 peningkatan pertumbuhan Pendapatan masing-masing hanya sebesar 3,36% dan 6,27%. Maka dari hasil perhitungan analisis diatas tergambarkan bahwa kinerja keuangan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok dalam periode ini cukup baik karena ada usaha untuk meningkatkan realisasi Pendapatan nya. Dan perlu perhatian khusus dalam upaya peningkatan Pendapatan untuk tahun yang akan datang, karena terlihat pada 2 tahun terakhir pertumbuhan Pendapatan sangat kecil.

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Adapun hasil dari perhitungan pertumbuhan belanja tahun 2009-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Pertumbuhan Belanja Pada DPPDK Kota SolokTA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja Tahun Berjalan(Xt)** | **Belanja Tahun Sebelumnya (Xt-1)** | **Pertumbuhan****( (Xt – Xt-1)/ Xt-1) X100%** |
| 2009 | 8.820.735.487 | 8.015.775.915 | 10,04 |
| 2010 | 8.384.346.885 | 8.820.735.487 | (4,95) |
| 2011 | 8.231.626.305 | 8.384.346.885 | (1,82) |
| 2012 | 9.273.770.166 | 8.231.626.305 | 12,66 |
| 2013 | 11.409.520.859 | 9.273.770.166 | 23,03 |
| 2014 | 14.575.230.332 | 11.409.520.859 | 27,75 |
| 2015 | 19.214.701.366 | 14.575.230.332 | 31,83 |
| **Rata-rata pertahun** | **14,08** |

Sumber : Laporan DPPDK Kota Solok

 Berdasarkan tabel 7 di atas terlihat pertumbuhan belanja dari tahun 2009-2015 berfluktuasi. Tahun 2009 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan sebesar 10,04%. Namun di tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan belanja masing-masing sebesar 4,95% dan 1,82%. Ini disebabkan karena realisai PAD di tahun 2010 yang rendah sehingga menyebabkan anggaran belanja menurun begitu juga di tahun 2011 realisasi PAD yang masih rendah, dan berdampak terhadap belanja di tahun 2011 yang menyebabkan terjadi sedikit penurunan namun sudah lebih meningkat dibandingkan tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012 terjadi peningkatan kembali sebesar 12,66%. Setelah itu di tahun 2013 terjadi peningkatan belanja sebesar 23,03%. Tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan masing-masing 27,75% dan 31,83% dengan rata-rata pertumbuhan belanja pertahun sebesar 14,08%. Ini menunjukan bahwa pertumbuhan belanja yang selalu naik artinya beban dari tahun ke tahun juga bertambah. Pertumbuhan belanja yang terus-menerus naik ini harus diimbangi dangan pendapatan yang tinggi agar tidak menimbulkan defisit anggaran.

**Analisis Rasio Keuangan**

Analisis Rasio keuangan yang terdiri dari beberapa rasio antara lain;

* 1. Derajat Desentralisasi

Tabel 8 : Derajat Desentralisasi pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan (X)** | **Total Pendapatan (Y)** | **Derajat Desentralisasi** **((X/Y) x 100%)** |
| 2009 | 65.630.000 | 3.040.169.519 |  2,16  |
| 2010 | 30.286.000 | 1.653.323.788 |  1,83  |
| 2011 | 78.356.500 | 1.638.614.680 |  4,78  |
| 2012 | 120.809.500 | 3.786.519.500 |  3,19  |
| 2013 | 178.136.000 | 4.804.496.000 |  3,71  |
| 2014 | 184.125.000 | 5.390.575.000 |  3,42  |
| 2015 | 195.666.000 | 3.736.581.000 |  5,24  |
| **Rata-rata pertahun** | **3,48** |

 Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 8 di atas terlihat Derajat desentralisasi dari tahun ke tahun berfluktuasi. Untuk tahun 2009 derajat desentralisasinya sebesar 2,16%. Lalu tahun 2010 derjat desentralisasi hanya sebesar 1,83%, sangat kecil derajat desentralisasi pada tahun 2010, ini disebabkan rendahnya nilai Pendapatan di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 angka derajat desentralisasi sebesar 4,78%, meningkat dari tahun sebelumnya, dan juga terlihat Pendapatan di tahun 2011 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan derajat desentralisasi dibandingkan tahun 2011, nilai derajat desentralisasinya sebesar 3,19%, yang dipengaruhi oleh peningkatan Total Pendapatan yang sangat tinggi sebesar 131%, namun peningkatan Pendapatan hanya sebesar 54,18%. Pertumbuhan Pendapatan yang tidak sebanding dengan total penerimaan sehingga mengakibatkan nilai derajat desentralisasi mengalami penurunan. Dan di tahun 2013 derajat desentralisasi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 3,71%. Kemudian tahun 2014 terjadi penurunan kembali nilai derajat desentralisasi yaitu sebesar 3,42%. Lain halnya di tahun 2015 terjadi peningkatan derajat desentralisasi dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,24%, dimana tahun 2015 merupakan nilai tertinggi derajat desentralisasinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk rata-rata derajat desentralisasi pertahun baru sebesar 3,48%. Dan secara keseluruhan derajat desentralisasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 masih berada dalam skala interval 0,00 – 10,00% yang tergolong sangat kurang.

Derajat desentralisasi diperlukan untuk menilai kemampuan daerah dalam hal kemandirian dan tidak bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pendapatan yang baik dan signifikan akan sangat membantu dalam proses percepatan pembangunan di Kota Solok melalui SKPD terkait yang salah satu nya Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok. Jika Pendapatan bergerak ke arah yang lebih baik atau berhasil, maka melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok berhasil dalam penyelenggaraan daerah otonom dan akan sangat diperhitungkan dari SKPD lainnya di Kota Solok.

* 1. Rasio Ketergantungan Daerah

Adapun hasil rasio ketergantungan Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 adalah sebagai berikut;

Tabel 9 Rasio Ketergantungan Daerah DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Transfer(X)** | **Total Pendapatan** **(Y)** | **Rasio Ketergantungan Daerah ((X/Y) x 100%)** |
| 2009 | 2.974.539.519 | 3.040.169.519 | 97,84 |
| 2010 | 1.623.037.788 | 1.653.323.788 |  98,17  |
| 2011 | 1.560.258.180 | 1.638.614.680 |  95,22  |
| 2012 | 3.665.710.000 | 3.786.519.500 |  96,81  |
| 2013 | 4.626.360.000 | 4.804.496.000 |  96,29  |
| 2014 | 5.206.450.000 | 5.390.575.000 |  96,58  |
| 2015 | 3.540.915.000 | 3.736.581.000 |  94,76  |
| **Rata-rata pertahun** | **96,53** |

 Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 9 diatas terlihat rasio ketergantungan daerah dari tahun 2009-2015 sangat tinggi karena berada pada skala interval >50%. Ini menunjukan tingkat ketergantungan daerah khususnya pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok sangat tergantung kepada transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Dengan rasio ketergantungan daerah tahun 2009 sebesar 97,84%, dan di tahun 2015 sebesar 94,76%. Untuk rata-rata rasio ketergantungan daerah pertahun sebesar 96,53%, ini menunjukan angka yang cukup tinggi itu artinya dilihat dari rasio ini tingkat ketergantungan daerah menggambarkan bahwa pengeluaran, baik itu pembiayaan dan belanja pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

* 1. Kemandirian Daerah

Adapun hasil rasio Kemandirian Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 adalah sebagai berikut;

Tabel 10 Rasio Kemandirian Daerah pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan (X)** | **Pendapatan Transfer (Y)** | **Rasio Kemandirian Daerah** **((X/Y) x 100%)** |
| 2009 | 65.630.000 | 2.974.539.519 | 2,21 |
| 2010 | 30.286.000 | 1.623.037.788 | 1,87 |
| 2011 | 78.356.500 | 1.560.258.180 | 5,02 |
| 2012 | 120.809.500 | 3.665.710.000 | 3,30 |
| 2013 | 178.136.000 | 4.626.360.000 | 3,85 |
| 2014 | 184.125.000 | 5.206.450.000 | 3,54 |
| 2015 | 195.666.000 | 3.540.915.000 | 5,53 |
| **Rata-rata pertahun** | **3,61** |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 10 di atas terlihat Rasio Kemandirian Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 rendah sekali dan terlihat pola hubungan kemandirian daerah termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan. Terlihat rasio kemandirian daerah pada tahun 2009 hanya sebesar 2,21%. Lalu di tahun 2010 rasio kemandirian daerah lebih rendah lagi yaitu sebesar 1,87%. Untuk tahun 2011 rasio kemandirian daerah meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 5,02%. Kemudian tahun 2012-2014 kembali terjadi penurunan di bandingkan tahun 2011 masing-masing 3,30%, 3,85% dan 3,54%. Namun di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,53%. Akan tetapi untuk rata-rata rasio kemandirian daerah pertahun hanya sebesar 3,61%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh Pendapatan yang dihasilkan.

Dari hasil rasio di atas menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi sangat tinggi. Untuk itu perlu meningkatkan PAD, agar daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya melalui SKPD terkait salah satunya pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok.

* 1. Rasio Efektifitas Pendapatan

Adapun hasil rasio efektifitas Pendapatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 adalah sebagai berikut;

Tabel 11 Rasio Efektifitas PAD Pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Pendapatan (X)** | **Target PAD****(Y)** | **Rasio Efektifitas Pendapatan** **((X/Y) x 100%)** |
| 2009 | 65.630.000 | 85.458.000 | 76,80 |
| 2010 | 30.286.000 | 96.550.000 | 31,37 |
| 2011 | 78.356.500 | 93.375.000 | 83,92 |
| 2012 | 120.809.500 | 120.735.000 | 100,06 |
| 2013 | 178.136.000 | 204.680.000 | 87,03 |
| 2014 | 184.125.000 | 250.067.200 | 73,63 |
| 2015 | 195.666.000 | 237.700.000 | 82,32 |
| **Rata-rata pertahun** | **76,45** |

Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

 Bedasarkan tabel 11 di atas terlihat rasio efektifitas Pendapatan dari tahun 2009-2015 mengalami fluktuasi, hal ini terlihat rasio efektifitas Pendapatan tahun 2009 baru mencapai 76,80% dan di tahun 2010 rasio efektifitas Pendapatan hanya 31,37%. Kemudian pada tahun 2011 rasio efektifitas Pendapatan meningkat sebesar 83,92% dibandingkan realisasi tahun 2010. Akan tetapi di tahun 2012 rasio efektifitas Pendapatan meningkat melebihi dari 100% sebesar 100,06%. Lalu di tahun 2013 rasio efektifitas Pendapatan menurun dibandingkan tahun 2012 sebesar 87,03%. Sedangkan untuk tahun 2014 rasio efektifitas Pendapatan juga terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,63%. Dan pada tahun 2015 rasio efektifitas Pendapatan meningkat dari tahun 2014 sebesar 82,32%. Namun untuk rata-rata rasio efektifitas Pendapatan pertahun baru mencapai 76,45%.

 Pemerintah Daerah dikatakan mampu menjalankan tugasya apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Dan terlihat rata-rata rasio efektifitas pertahun baru mencapai 76,45% artinya tingkat efektifitas Pendapatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok menunjukan kurang efektif karena berada pada interval 75% - 89%.

* 1. Efisiensi Pendapatan

Adapun hasil rasio efisiensi Pendapatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.12 Rasio Efisiensi Pendapatan Pada DPPDK Kota Solok TA. 2009-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Biaya Pemerolehan PAD (X)** | **Realisasi PAD (Y)** | **Rasio Efisiensi PAD** **((X/Y) x 100%)** |
| 2009 | 34.913.200 | 65.630.000 | 53,20 |
| 2010 | 72.292.750 | 30.286.000 | 238,70 |
| 2011 | 37.947.500 | 78.356.500 | 48,43 |
| 2012 | 58.671.500 | 120.809.500 | 48,57 |
| 2013 | 66.557.500 | 178.136.000 | 37,36 |
| 2014 | 69.495.700 | 184.125.000 | 37,74 |
| 2015 | 136.053.200 | 195.666.000 | 69,53 |
| **Rata-rata pertahun** | **76,22** |

 Sumber : Laporan Keuangan DPPDK Kota Solok

Berdasarkan tabel 4.12 di atas terlihat rasio efisiensi Pendapatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 tidak efisien karena berada pada interval >30%. Yang paling mencolok di tahun 2010 terlihat rasio efisiensi Pendapatan sangat tinggi sebesar 238,70%, ini disebabkan realisasi Pendapatan yang sangat rendah sedangkan Biaya yang dikeluarkan begitu besar. Begitu juga di tahun 2015 rasio efisiensi Pendapatan sebesar 69,53%. Dan rata-rata rasio efisiensi Pendapatan pertahun sebesar 76,22%.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis laporan keuangan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan yang diwakili oleh Analisis Varians untuk Pendapatan dan Belanja menunjukan hasil bahwa kinerja pendapatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 belum baik. Sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik.
2. Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis pertumbuhan Aset, Ekuitas, dan Pendapatan, masing-masing akun mengalami peningkatan yang cukup baik diiringi dengan realisasi belanja yang juga meningkat dengan pertumbuhan kewajiban/hutang 0 (nol) %.
3. Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukan hasil bahwa derajat desentralisasi pada SKPD ini perlu perhatian khusus, karena angka derajat desentralisasi yang sangat rendah sehingga kemampuan daerah terhadap penyelenggaraan daerah otonom yang sangat bergantung kepada dana atau transfer pusat, otomatis rasio kemandirian daerahnya juga rendah menggambarkan pola hubungan yang instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan sehingga menyebabkan rasio ketergantuang daerah menjadi tinggi. Selain itu dalam hal efektifitas dan efisiensi Pendapatannya menunjukan kurang efektif dan tidak efisien.

Dari rumusan kesimpulan diatas dapat di simpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok TA. 2009-2015 belum cukup baik.

**Saran**

Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok hendaknya berusaha untuk mencapai target PAD, sehingga efektifitas Pendapatan, derajat desentralisasi dan kemandirian daerah bisa lebih baik. Dan menekan biaya pemerolehan Pendapatan sehingga tingkat efisiensi dapat terwujud.
2. Penelitian ini baru menggunakan 3 (tiga) analisis dalam menilai kinerja keuangan SKPD, maka sebaiknya peneliti yang akan datang menggunakan lebih banyak analisis lagi untuk menilai kinerja keuangannya. Selain itu, sebaiknya peneliti yang akan datang juga memperbanyak sampelnya, agar hasilnya lebih teregeneralisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhiantoko, Hony. 2013.”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta

Agussalim, Manguluang. 2010. *Metodologi Penelitian*. Padang: Ekasakti Press

Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Daling, Marcelino. 2013. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. 11(1), 82-89

Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Halim, Abdul & M. Syam kusufi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Hanafi, Imam Mugroho dan Tri Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. UB Press.

Kaya, Mastika. 2014. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontolo”. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Gorontalo.

Lisanti, Dewi. 2014. “Analisa Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2012-2013”. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Ekasakti Padang.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Nugroho, Arif Akram. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008-2010*”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*

Promono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta.* Jurnal. 11(1),93-94

Saputra, Aidil. 2015. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan bank Syariah Menggunakan Pendekatan Laba Rugi dan Nilai Tambah”. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Ekasakti Padang.

Setiawan, E. 2015. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sitiana, Mega. 2014. *Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal. 12(4), 277-286.